**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KDRT**

**( PUTUSAN NO.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl )**

****

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**NABILAH KHOIRUNNISA WILASARI**

**5121600224**

**FAKULTAS HUKUM**

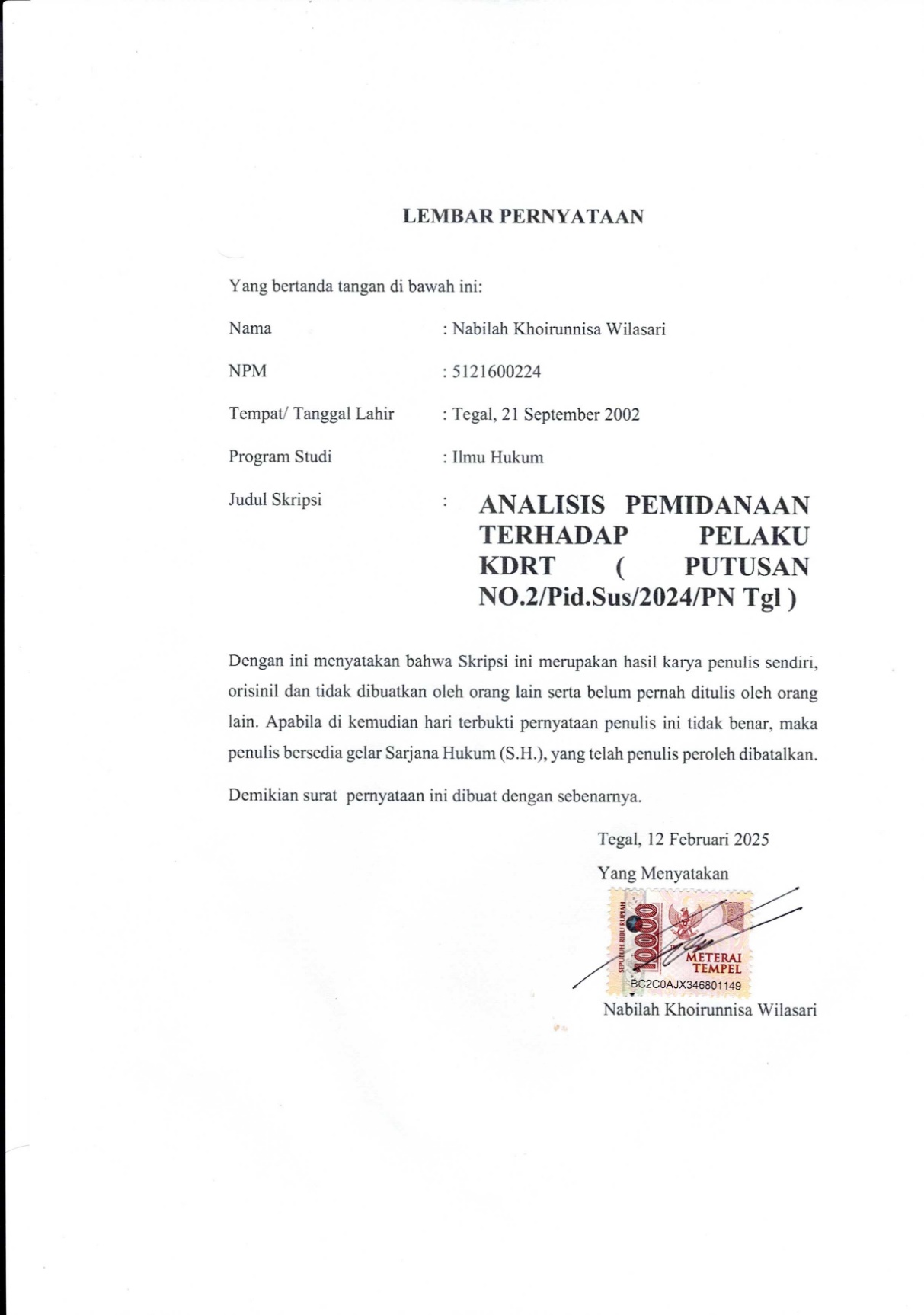
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

# 







# DAFTAR ISI

[**HALAMAN JUDUL ……………………............................................................ i**](#_Toc179134400)

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………………………… ii**

**PERNYATAAN ……………………………………………………………….. iii**

**ABSTRAK ……………………………………………………………………... iv**

**ABSTRACT …………………………………………………………………….. v**

**MOTTO ………………………………………………………………………… vi**

**PERSEMBAHAN …………………………………………………………….. vii**

**KATA PENGANTAR ………………………………………………………... viii**

**DAFTAR ISI …………………………………………………………………… ix**

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc179134403)

A. [Latar Belakang 1](#_Toc179134404)

B. [Rumusan Masalah………………………………………………………… 10](#_Toc179134405)

C. Tujuan Penelitian ……………………………………………..………….. 10

D. Urgensi Penelitian ………………………………………………………… 10

E. Tinjauan Pustaka ………………………………………………………….. 12

F. Metode Penelitian …………………………………………………………. 14

G. Rencana Sistematika Penulisan …………………………………………… 18

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL](#_Toc179134406) ………………………………………… 20

A.Tinjauan Tentang Tindak Pidana ………………………………………….. 20

A.1 Pengertian Tindak Pidana …………………………………………… 20

A.2 Unsur Tindak Pidana ……………………………………………….. 27

A.3 Jenis Tindak Pidana ………………………………………………… 32

B.Tinjauan Tentang Pemidanaan ……………………………………………. 35

B.1 Pengertian Pemidanaan …………………………………………….. 35

B.2 Pedoman Pemidanaan ……………………………………………… 39

B.3 Teori Dalam Pemidanaan …………………………………………... 41

C.Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ……………………... 51

C.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga ……………………… 51

C.2 Asas dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga …. 55

C.3 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga …………………. 56

[BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …………………….. 58](#_Toc179134410)

[A.Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Positif Indonesia ……………………………………………………... 58](#_Toc179134412)

A.1 Pengaturan KDRT ………………………………...……………….. 58

A.2 Pasal - Pasal Yang Mengatur Tentang KDRT ……..……………… 65

B. Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN TGL) ……………………………….. 68

B.1 Proses Peristiwa KDRT …………………………………………… 68

B.2 Amar Putusan ……………………………..……………………… 71

B.3 Hambatan Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Terdawa Pada Perkara KDRT Dalam Putusan No.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl …………... 73

[**BAB IV PENUTUP …………………………………………………………… 77**](#_Toc179134410)

1. Kesimpulan ………………………………………………………………. 77

B. Saran ……………………………………………………...……………… 78

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………. 80

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ………………………………………………. 83**

# BAB I

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai negara yang mempunyai populasi terbanyak ke-4 setelah negara Amerika. Hal ini dibuktikan dengan adanya sumber dari World Population Review yang menyebutkan bahwasanya jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 sebesar 279.390.258 jiwa.[[1]](#footnote-1) Tidak menutup kemungkinan banyaknya jumlah penduduk di suatu negara maka tingkat kejahatan yang dialami oleh warga negara juga semakin tinggi. Salah satu contohnya negara Indonesia, banyak dari mereka yang melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, perkosaan, KDRT dan lain lain. Di Indonesia sendiri kasus KDRT kerap sering terjadi di lingkup masyarakat khususnya di lingkup rumah tangga. KDRT dikenal luas sebagai bentuk pelanggaran hak asasi, yang mana sebagai tindak kriminal yang kerap menimpa perempuan, anak, maupun istri. Komite Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*General Recommendation* No. 19, 1992) menegaskan bahwasanya kekerasan berbasis gender termasuk dalam kategori KDRTyang dilakukan oleh pelaku berupa kekerasan seksual, fisik, maupun psikis terjadi dan berakar pada adanya perbedaan dari jenis kelamin maupun gender pada lingkup masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) secara implisit menggarisbawahi bahwasanya KDRT tidak sekadar merujuk pada tindakan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan emosional maupun mental bagi korban. Adapun perempuan sebagai kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak dalam lingkup rumah tangga. Sehingga regulasi ini menyoroti bahwasanya ancaman, pemaksaan, serta pengabaian tanggung jawab rumah tangga dianggap sebagai bentuk kekerasan, terutama bila dilakukan dengan cara yang melanggar hukum atau bertujuan merampas kebebasan korban.[[3]](#footnote-3) Ketika pelaku KDRT telah melakukan perbuatannya kepada korban maka akan berdampak pada trauma menakutkan yang kebanyakan sulit dihilangkan atau dilupakan oleh si korban akibat dari perbuatan pelaku. Selain itu, Maggi Humm berpendapat bahwasanya terdapat sejumlah indikator yang dianggap sebagai bentuk kekerasan pada perempuan di ranah rumah tangga , di antaranya meliputi[[4]](#footnote-4):

1. Segala bentuk tindakan kekerasan yang mana tidak hanya verbal namun juga fisik, yang dapat seperti perbuatan nyata ataupun ancaman atas keselamatan jiwa.
2. Kekerasan tersebut ditujukan kepada perempuan dikarenakan identitas gendernya, mencerminkan sikap meremehkan maupun diskriminasi yang menjadikan kekerasan sebagai sesuatu yang dianggap wajar.
3. Manifestasi kekerasan tersebut bisa berupa penghinaan, pembatasan kebebasan, maupun berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya.
4. tindakan kekerasan yang diperoleh tersebut merugikan psikologis maupun fisik pada perempuan,
5. Umumnya tindakan tersebut seringkali terjadi di lingkup keluarga ataupun rumah tangga.

Adapun tindakan dari pelaku KDRT pada korban dapat terjadi pada pihak istri maupun anak, hal ini dapat disebabkan oleh banyak sekali faktor pendukung terjadinya kasus KDRT di Indonesia. Faktor – faktor pendukung yang mendorong pelaku melakukan kejahatan KDRT merupakan faktor internal seperti karakteristik kepribadian serta agresif maupun faktor eksternalnya di antaranya meliputi mengkonsumsi minuman yang beralkohol, bias gender, kontrol dirinya yang rendah, keuangan, pemahaman ideologi harmoni, transmisi antargenersi, maupun pemahaman pada agamanya yang menyimpang.[[5]](#footnote-5)

Adapun UU No. 23/2004 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwasanya lingkup pihak yang dapat menjadi subjek atau korban KDRT tidak hanya terbatas pada hubungan suami, istri, maupun anak. Akan tetapu juga dapat meliputi anggota keluarga lainnya yang terhubung melalui perwalian, ikatan darah, perkawinan, pengasuhan, persusuan, selama pihak tinggal di satu atap. Selain itu, perlindungan hukum ini juga berlaku bagi individu yang bekerja membantu dalam rumah tangga serta menetap di lingkungan tersebut[[6]](#footnote-6):

Individu yang bekerja untuk membantu rumah tangga, yang dijelaskan di Pasal 2 Ayat (1) huruf c, mempunyai pengertian yang tertuang pada Pasal 2 Ayat (2). Adapun individu yang dimaksud dianggap sebagai anggota keluarga selama masa tinggal maupun keterlibatannya dalam rumah tangga tersebut.

Kasus KDRT di Indonesia telah diatur sebagaimana UU No. 23/2004. Regulasi tersebut berisi berbagai kebijakan mengenai tindak pidana KDRT serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku. KDRT sendiri termasuk dalam kategori delik aduan, adapun diatur pada Pasal 51 UU No. 23/2004, yang menjelaskan bahwasanya tindak pidana kekerasan sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 44 Ayat (4) hanya sebagai aduan yang bisa diproses jika adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan merujuk pada jenis tindak pidana yang hanya mampu diproses secara hukum jika terdapat pengaduan atas pihak yang merasa dirugikan, artinya penuntutan bisa dilakukan setelah korban atau pihak yang dirugikan melakukan pengaduan.[[7]](#footnote-7) Sehingga korban dapat mencabut laporannya apabila sudah terjadi suatu perdamaian.

Ada beberapa contoh kasus KDRT dimana hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku cukup ringan sebab hakim hanya melihat berdasarkan fakta – fakta dipersidangan. Contoh kasus KDRT yang dialami oleh pasangan artis suami istri antara lain KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora terjadi pada tanggal 28 September 2022 dimana sang suami/pelaku yang bernama Rizky Billar telah melakukan tindak kekerasan terhadap sang istri sebanyak 2 (dua) kali dengn cara Korban di cekik, didorong dan membanting istrinya. Sehingga mengakibatkan korban dirawat di rumah sakit. Atas tindakan tersebut pihak korban segera melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan KDRT. Selain itu korban juga menjalani visum yang bertujuan sebagai bukti yang dapat ditampilkan di persidangan nanti atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Kombes Pol Endra Zulpan, sebagai Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, mengungkapkan hasil visum terhadap Lesti yang dilakukan pada Rabu, 5 Oktober 2022. Visum tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Lesti telah menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya memar pada bagian depan leher Lesti, yang disertai pembengkakan dan rasa nyeri. Berdasarkan temuan tersebut, diduga kuat bahwa luka lebam tersebut merupakan akibat dari penganiayaan. Selain itu, hasil visum ini menegaskan bahwasanya kejadian KDRT yang dialami Lesti bukanlah sebuah rekayasa belaka. Pihak penyidik telah memperoleh sejumlah bukti – bukti yang dapat memperkuat kasus tersebut seperti hasil visum et repertum, foto – foto, CCTV serta keterangan yang diperoleh dari Asisten Rumah Tangga serta penjaga rumah. Total Keterangan saksi yang didapat berjumlah 7 orang.[[8]](#footnote-8)

Adapun kasus KDRT juga di alami oleh artis yang bernama Vena Melinda. Awal mula kejadian tersebut Vena Melinda bersama sang suami yang bernama Ferry Irawan sedang mengainap di salah Hotel di kota Kediri pada tanggal 8 Januari 2023. Secara tiba – tiba Vena Melinda meminta tolong kepada petugas hotel untuk memanggilkan dengan segara polisi untuk datang. Kemudian sang istri melaporkan atas kejadian kdrt yang dialaminya ke polres kediri namun berkas tersebut dilimpahkan ke polda jatim. Pada hari kamis tanggal 12 januari 2023 Ferry Irawan telah ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan laporan dari Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum dari vena melina menerangkan bahwasanya kejadian kdrt sudah dilakukan selama 3 bulan terakhir. Pelaku dalam melakukan tindak kekerasan terhadap korban dengan cara tangan ditindih, di bekap, maupun Dahi Ferry Irawan ditekan ke hidung korban sampai patah dikarenakan tekanan yang diberikan kepada korban terlalu keras. Atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku maka majelis hakim PN Kota Kediri menyataka bahwasanya benar Ferry Irwan telah melakukan tindakan berupa kekerasan fisik sebagaimana pasal 44 ayat (4) dan kekerasan psikis sesuai dengan pasal 45 UU No. 23/2004 mengenai Pengahapusan Tindakan KDRT, dengan vonis hukuman pidana yang diberikan yakni selama 1 tahun penjara.[[9]](#footnote-9)

Tindakan KDRT tidak hanya dialami oleh sang istri atas perlakuan kejam sang suami tetepi bisa juga dialami oleh seorang ibu yang diancam oleh seorang anak kandungnya sendiri menggunakan parang. Kasus seorang ibu yang diancam oleh anaknya menggunakan parang terjadi di Jalan Notes No.64-C Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatra Utara. Awal mula kejadian tersebut saksi korban (dalam hal ini masih berstatus sebagai ibu kandung) yang bernama Marlina Br. Sigalingging sedang duduk – duduk kemudian datanglah terdakwa yang bernama Cristian Mangatas Indra Utama Pardede (dalam hal ini masih berstatus sebagai anak kadung dari korban) dan bertemu. Lalu terdakwa meminta bantuan kepada korban untuk membilangkan minta uang sama bapak tetapi korban menolak dengan alasan “gak bisa ga ada pulsaku” sehingga terdakwa mendesak korban untuk menghubungi bapaknya untuk meminta, karena korban tidak kunjung menghubungi bapak terdakwa lalu terdakwa memaki korban dan mengatakan babi lah kau dan terdakwa pergi, tidak lama terdakwa kembali datang menemui saksi korban dengan membawa parang di tangan kiri lalu terdakwa mengacungkan parang sambil berkata "Sini Kau Anjing Biar Kubunuh Kau, Kau Musuhku Bukan Mamak Ku Kau Lagi Tapi Musuhku", setelah itu terdakwa pergi sambil mengatakan jangan pulang kau nanti mati kau kubuat, kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyimpan parang yang dipegang terdakwa ke dapur lalu terdakwa pergi. Atas kejadian tersebut majelis hakim memvonis terdakwa Cristian Mangatas Indra Utama Pardede telah terbukti secara sah maupun meyakinkan Tindakan pidana KDRT dengan masa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa yaitu 1 tahun maupun 6 bulan sesuai putusan pengadilan dengan nomor register 1854/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

Sehingga seringkali membuat pihak korban merasa tidak adil karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku biasanya menimbulkan luka fisik bahkan banyak dari mereka yang mengalami trauma diakibatkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Sama halnya dengan perkara KDRT dalam putusannya NO.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl dimana terdakwa di jatuhkan hukuman oleh hakim selama 2 bulan 15 hari karena dalam putusannya menyatakan bahwasanya secara hukum terbukti dan diyakini bersalah atas tindakan kekerasan fisik yang terjadi di rumah tangga. Perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23/2004 mengenai Penghapusan KDRT, sejalan dengan tuntutan tunggal yang diajukan pihak penuntut umum. Dakwaan tunggal yang dibuat oleh penuntut umum mempunyai arti tersendiri sebagai suatu surat dakwaan yang mengatur tuduhan terhadap satu jenis tindak pidana saja, tanpa memungkinkan adanya pengajuan dakwaan alternatif atau pengganti. Sebagai contoh, dakwaan tersebut hanya mengarah pada tindak pidana pencurian tanpa mencantumkan tuduhan lain (pasal 362 KUHP).[[10]](#footnote-10)

Sebagaimana Pasal 44 ayat (1) dari UU No. 23/2004 mengatur bahwasanya individu yang terbukti melakukan kekerasan fisik di rumah tangga bisa dikenakan sanksi pidana. Hukuman diberikan mampu berupa pidana penjara dengan durasi selama-lamanya 5 tahun atau dikenakan denda yang jumlahnya tidak melebihi 15 juta rupiah. Ketentuan ini menegaskan bahwasanya perlindungan terhadap korban KDRT sebagai hal yang serius dan diatur dengan sanksi yang jelas. Akan tetapi pada putusan No.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl terdakwa hanya dijatuhi hukuman selama 2 bulan 15 hari karena hakim memiliki pertimbangan lain yang meringankan salah satunya terdakwa sudah berusia tua. Namun sangat disayangkan hukuman yang diberi hakim kepada terdakwa tidak berbanding lurus dengan dampak yang dialami oleh pihak korban berupa lecet maupun luka memardi kelopak mata kanan, luka memar pada di lipatan siku kanan, lengan bawah kanan dan punggung tangan kanan dan trauma psikis. Selain itu ketika menghadirkan saksi – saksi di persidangan terdapat beberapa perbedaan yakni saksi yang diajukan penuntut umum degan saksi yang diajukan oleh pengacara terdakwa. Di dalam persidangan tersebut kedua saksi baik saksi yang diajukan oleh jaksa dan saksi yang diajukan oleh pengacara dalam memberikan keterangannya di muka persidangan sangatlah berbeda. Oleh karena itu dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut, penulis tertarik guna mengkaji lebih dalam dengan judul skripsi “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku KDRT(Putusan NO.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl ).”

1. **Rumusan Masalah**

Sebagaimana penjabaran permasalahan yang ada pada latar belakang, adapun beberapa rumusannya pada penelitian hukum yang sedang dijalani penulis di antaranya meliputi:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana KDRT dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum pada pelaku KDRT dalam Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tgl?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT (Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tgl ) di antaranya meliputi :

1. Untuk menganalisa maupun memahami pengaturan tentang tindak pidana KDRT dalam hukum positif Indonesia
2. Untuk menganalisa serta memahami penegakan hukum kepada pelaku KDRT dalam Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tgl
3. **Urgensi Penelitian**

Berharap penelitian ini, bisa bermanfaat kepada aparat penegak hukum dan korban KDRT di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya perolehan temuan ini mampu berguna bagi aparat penegak hukum maupun korban KDRT dalam hal peningkatan perlindungan kepada korban serta dapat memberikan sanksi pada pelaku KDRT sebagaimana dengan regulasi yang berlaku dan juga sesuai dengan fakta di persidangan. Selain itu dilihat dari sudut pandang teori hukum diharapkan dapat mengkaji secara mendalam apakah putusan perkara KDRT No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tgl telah memberikan rasa keadilan bagi pihak korban maupun Vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku apakah sejalan dengan ketentuan UU yang berlaku sehingga dapat mencegah adanya upaya tindakan kekerasan dalam rumah tangga di kedepannya.

1. Manfaat Praktis

Adapun harapannya penelitian ini mampu memberikan masukan dan pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan yakni bagi aparat penegak hukum agar dapat meningkatkan standarisasi dalam penanganan kasus KDRT di semua tingkatan terutama ditingkat pengadilan. Hal ini bermanfaat untuk memahami prosedur yang lebih jelas dalam menangani berbagai kasus KDRT, sehingga keputusan yang diambil dapat menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang sedang berperkara. Selain itu bagi pihak korban KDRT **dapat menjangkau akses keadilan dengan mudah.** Penelitian ini dapat membantu korban memahami prosedur – prosedur menyelesaikan perkara KDRTnya sendiri.

1. **Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa penelitian sejenis yang terkait dengan penelitian penulis yang berjudul “ Analisa Pemidanaan Terhadap Pelaku KDRT (Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tgl)” yakni sebagai berikut :

* + - 1. M. Reza Aditya, (2016), Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tentang Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AL (Studi Putusan : PUT/153-K/PM 1-04/AL/XI/2011)” [[11]](#footnote-11). Adapun metode penelitian yang diterapkan yakni tipe hukum yuridis normative dengan spesifikasi penelitian in concert. Adapun sumber datanya menggunakan 2 jenis sumber data yakni di antaranya sekunder maupun primer. Selain itu penulis dalam penelitiannya menggunakan metode penghimpunan data dengan dengan wawancara maupun studi kepustakaan dan penelitian dilapangan yang dilaksanakan di Kantor Denpomal Lanal Lampung Jalan Yos Sudarso KM 10 Panjang Lampung. Kemudian data yang diperoleh akan diolah oleh penulis dan selanjutnya disajikan dengan digunakannya metode analisis deskriptif kualitatif.
      2. Lutfiah Fauzi, Emy Rosnawati, (2023), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Tentang Jurnal dengan judul “ Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” [[12]](#footnote-12) kajian ini menggunakan yuridis normatif melalui pendekatan permasalahan berbasis kasus. Sumber hukum yang dijadikan referensi mencakup sumber hukum primer maupun sekunder. Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti menerapkan metode analisis deduktif, yaitu suatu teknik yang mengumpulkan berbagai fakta untuk kemudian dikembangkan menjadi teori yang lebih umum. Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim No. 180/Pid.Sus/2020 PN. Sda, yang berkaitan dengan KDRT, ditemukan bahwasanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sudah sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Namun demikian, terdapat ketidakadilan dalam putusan tersebut, mengingat hukuman yang diberikan hanya tiga tahun penjara. Padahal, Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT No. 23/2004 mengatur bahwasanya seseorang yang melakukan tindak KDRT dapat dikenai hukuman pidana. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku berupa pidana penjara dengan batas maksimal lima tahun atau denda yang jumlahnya tidak melebihi 15 juta rupiah.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Diterapkannya metode studi pustaka (library research) pada penelitian ini, yang melibatkan pengumpulan data melalui analisa pada berbagai sumber trtulis, di antaranya laporan, buku, literatur, maupun catatan yang sesuai degan isu yang akan diinvestigasi diteliti[[13]](#footnote-13). Pengumpulan data – data yang dimaksud oleh penulis dalam penelitiannya dengan cara mengindentifikasi sumber hukum yang didapat sesuai dengan permasalahan dalam penelitian skripsi penulis tersebut.

1. Pendekatan penelitian

Penulis mengimplementasikan pendekatan normatif yang sejalan dengan paradigma penelitian hukum (legal research) dan mencerminkan ciri khas disiplin ilmu hukum (jurisprudence). Dalam konteks ini, pendekatan yang dipilih disesuaikan secara tepat dengan isu hukum yang menjadi fokus utamanya, sehingga metode yang digunakan dapat mencerminkan substansi permasalahan yang akan dianalisis. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitiannya menggunakan pendekatan normatif berbasis Case Approach atau pendekatan Kasus. Terdapat 5 macam pendekatan normative menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul yakni sebagai berikut[[14]](#footnote-14) :

1. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merujuk pada metode yang dilaksanakan dengan melakukan kajian mendalam pada berbagai UU maupun regulasi yang relevan pada isu hukum yang sedang dianalisis oleh peneliti.

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan berbasis kasus diterapkan dengan menganalisis berbagai kasusyang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun kasus tersebut telah diputuskan oleh pengadilan maupun berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

1. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah pada permasalahan yang di analisis maupun perkembangannya terhadap peraturan terkait isu yang dihadapi. Analisis ini dibutuhkan ketika peneliti berupaya menggali pemikiran filosofis dan pola konseptual yang mendasari lahirnya isu yang tengah dikaji.

1. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini diterapkan melalui cara yaitu membandingkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan peraturan dari negara lain, yang mengatur hal serupa. Peneliti juga bisa melakukan perbandingan terhadap beberapa putusan pengadilan di berbagai negara yang menangani kasus yang sebanding.

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Studi hukum dengan pendekatan konseptual ini berakar pada teori-teori dan perspektif yang berkembang, khususnya dalam wacana ilmu hukum. Melalui pendalaman terhadap hal tersebut, peneliti akaan dapat mengidentifikasi maupun menghasilkan pemahaman, konsep, serta prinsip berbagai hukum yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan hukum yang sedang dianalisis.

1. Data penelitian

Digunakannya data sekunder pada penelitian ini. Menurut Soerjo Soekamto bahwasanya data sekunder merujuk pada informasi yang mencakup berbagai dokumen resmi, literatur, serta hasil kajian terdahulu yang disajikan dalam bentuk laporan.[[15]](#footnote-15) Adapun penulis memanfaatkan sumber yang terdiri atas:

1. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT No. 23/2004)
2. Jurnal Hukum
3. Buku Hukum
4. Kamus Besar Bahasa Indonesia
5. Serta literatur pendukung yang mempunyai hubungannya dengan penegakan pelaku KDRT.
6. Keputusan
7. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan studi literatur, yang bertujuan untuk memperoleh berbagai sumber hukum primer ataupun sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta jurnal yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

1. Metode analisis data

Penulis mengaplikasikan pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan dengan pendekatan ini mutu riset sangat ditentukan oleh kualitas serta kelengkapan data yang dikumpulkan. Pengumpulan data ini dilakukan melalui teknik observasi, dokumentasi, maupun wawancara.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi yang dilakukan oleh penulis pada penelitiannya yang berjudul “ Analisa Pemidanaan Terhadap Pelaku KDRT ( PUTUSAN NO.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl )” bertujuan agar memudahkan penulis dalam Menyusun skripsi secara lebih terarah dan lebih sistematis. Selain itu agar pembaca mudah memahami isi tujuan dibuatnya skripsi hukum yang berjudul “ Analisa Pemidanaan Terhadap Pelaku KDRT ( PUTUSAN NO.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl )”. Dalam skripsi ini terbagi menjadi IV Bab yang akan dibahas masing masing bab yakni di antaranya meliputi:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB 1 penulis akan menguraikan secara lengkap mengena latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, metode maupun sistematika penulisannya.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**

Pada Bab II, penulis akan menguraikan secara mendalam mengenai perspektif umum terkait penegakan hukum, gambaran umum mengenai KDRT, analisis terhadap pelaku KDRT, serta telaah umum mengenai perlindungan korban terhadap kekerasan pelaku KDRT.

**BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada BAB III, disajikan data hasil kajian yang telah melalui proses pengolahan, analisis, dan interpretasi. Data yang diperoleh akan disusun berdasarkan urutan permasalahan yang dibahas, yang telah dikonstruksi sesuai dengan kajian literatur yang relevan. Penulis akan menguraikan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku KDRT yang telah berusia lanjut sesuai dengan putusan yang sudah dikeluarkan PN Kota Tegal pada putusan NO.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl. serta apakah dalam putusan NO.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Tegal telah sejalan dengan UU PKDRT No. 23/2004 . Selain itu penulis akan menjabarkan mengenai apakah penjatuhan hukuman yang diberikan majelis hakim pemeriksa perkara di pengadilan negeri kota tegal pada pelaku KDRT mampu memberikan korban suatu keadilan.

**BAB IV PENUTUP**

Pada BAB IV ini sebagai bagian akhir yang dilakukan oleh penulis. Bagian ini berisikan kesimpulan maupun saran yang keseluruhannya menjawab mengenai bagian rumusan masalah.

# BAB II

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

**A.1 Pengertian Tindak Pidana**

Terdapat banyak sekali definisi terkait tindak pidana baik yang disampaikan dari pendapat para ahli maupun yang berasal dari literatur kepustakaan hukum. Literatur kepustakaan hukum yang di maksud biasanya berasal dari Undang – Undang yang terkait, jurnal hukum, buku hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, keputusan, maupun literatur pendukung yang memiliki hubungannya dengan penegakan pelaku KDRT.

Tindak pidana yang termasuk pada KUHP diperoleh melalui proses terjemahan resmi yang dilakukan oleh tim Penerjemah dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni dengan menggunakan istilah *strafbaar feit.* Istilah strafbaar feit tersebut digunakan dengan berbagai asalannya di antaranya meliputi:[[16]](#footnote-16)

1. Istilah tindak pidana digunakan karena, dalam perspektif sosio-yuridis, hampir seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pidana mengadopsi terminologi tersebut.
2. Seluruh lembaga penegak hukum, beserta sebagian besar aparat penegak hukum, secara konsisten menerapkan istilah tindak pidana dalam praktiknya.
3. Mahasiswa yang terlibat dalam “ritual tertentu” dengan mengacu pada konsep tindakan pidana, pada praktiknya, kesulitan dalam menghadapi kebiasaan umum yang lebih sering menggunakan istilah tindak pidana.

Pada hukum pidana juga diketahui dengan istilah “*Delik”.* Definisi Delik sendiri memiliki arti yang sama dengan istilah “ *Strafbaarfeit”* karena keduanya berasal dari terjemahan Bahasa Belanda. Istilah tersebut memiliki arti yakni perbuatan yang dapat di hukum dan/atau suatu perbuatan atau tindak pidana. Asal mula kalimat “*Strafbaarfeit”* terdapat sejumlah komponen kata yang digabungkan, antara lain “Baar”, “Straf”, serta “Feit”. Kata “Straf” merujuk pada konsep hukum dan pidana, sementara “Baar” mengandung makna kemampuan atau izin. Sementara itu, “Feit” dapat didefinisikan dalam berbagai dimensi, seperti tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.[[17]](#footnote-17)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “delik” dalam ranah hukum pidana merujuk pada tindakan yang dikenai hukuman akibat melanggar aturan atau ketentuan hukum yang berlaku.[[18]](#footnote-18)

Terdapat beragam pendapat para ahli hukum pidana dalam menyampaikan berbagai opini terkait dengan delik. Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli hukum pidana mengenai penggunaan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, ataupun delik.

J.E. Jonkers merumuskan bahwasanya peristiwa pidana merujuk pada tindakan yang bertolak belakang dengan hukum (*wederrechttelijk*), yang terhubung dengan adanya pelanggaran atau kesalahan individu yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.[[19]](#footnote-19)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang diperbuat oleh seorang individu, yang mana pelaku dari perbuatan tersebut berpotensi untuk dikenakan hukuman pidana sebagai akibat dari tindakannya.[[20]](#footnote-20)

H.J. Schravendijk menegaskan bahwasanya perbuatan yang dapat dihukum yaitu tindakan seseorang yang bertentangan dengan kesadaran hukum, dengan demikian tindakan tersebut layak dikenakan sanksi, dengan syarat pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[[21]](#footnote-21)

Simons mengemukakan bahwa konsep strafbaar feit merujuk pada suatu perbuatan yang dengan sengaja dilaksanakan oleh seseorang yang melanggar hukum, di mana pelaku perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, sehingga mampu dikenakan sanksi pidana.[[22]](#footnote-22)

Menurut Satochid Kartanegara, penggunaan istilah tindak pidana lebih dianjurkan, karena istilah tersebut mencakup dua pengertian, yaitu tindakan yang dilakukan (aktif) maupun ketidakberlakuan tindakan atau pengabaian terhadap suatu perbuatan (pasif).[[23]](#footnote-23)

Adami Chazawi menjelaskan bahwasanya suatu larangan untuk melakukan tindakan yang disertai ancaman pidana disebut tindak pidana, yang diambil dari istilah “Strafbaar Feit,” dan seringkali juga dikenal dengan sebutan “delik,” dari kata "delict.”[[24]](#footnote-24)

Pompe juga memberikan pendapat mengenai istilah *Strafbaar Feit* yang sebagaimana di kutip dalam buku karya Lamintang, dijelaskan bahwasanya tindak pidana sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang menciptakan gangguan terhadap tatanan hukum, yang dapat terjadi baik secara sengaja maupun tanpa disengaja oleh individu tertentu. Dalam konteks ini, pelaku perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi hukum dianggap diperlukan untuk menjaga kelangsungan ketertiban hukum.[[25]](#footnote-25)

Adapun menurut Simons, dalam karya yang sama, mengemukakan bahwasanya Strafbaar feit bisa didiefinisikan sebagai sebuah tindakan yang melanggar ketentuan hukum, yang secara sengaja dilakukan oleh individu yang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau yang dalam pandangan hukum, dipandang sebagai tindakan yang layak dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan yang berlaku.[[26]](#footnote-26)

Menurut Bambang Poernomo, rumusan perbuatan pidana akan lebih utuh jika disusun dengan cara tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh norma hukum pidana serta dapat berakibat pada pemberian hukuman pidana terhadap siapa saja yang melakukannya yang melanggar ketentuan tersebut.[[27]](#footnote-27)

Menurut Usman Simanjuntak, tindakan pidana dipahami sebagai perbuatan fisik yang tergolong dalam kategori tindak pidana. Ia memilih menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk menggambarkan strafbaar feit, karena istilah tersebut lebih jelas dan merujuk pada perbuatan fisik yang melanggar hukum. Namun, ia juga menegaskan bahwa tidak semua tindakan fisik merupakan tindak pidana, dan sebaliknya, satu perbuatan fisik dapat menimbulkan beragam tindak pidana.[[28]](#footnote-28)

Utrecht lebih mengutamakan penggunaan istilah peristiwa pidana, karena menurutnya bahwasanya istilah tersebut mencakup baik perbuatan (*andelen*) atau tindakan positif, maupun dampak atau akibat yang ditimbulkan, baik yang bersifat aktif (*doen*) maupun pasif (*met doen* atau *visum/nabetan*).[[29]](#footnote-29)

Menurut Jonkers mengartikan *Strafbaar Feit* dalam konteks peristiwa pidana, merujuk pada tindakan yang melanggar hukum (*wederrechttelijk*), yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian atau kesalahan yang dilakukan oleh individu yang bisa dimintai tanggungjawab atas perbuatannya.[[30]](#footnote-30)

Selain itu, terdapat banyak sekali para ahli hukum pidana yang lebih senang mempergunakan istilah “Delik” dikarenalam penggunaan istilah tersebut tercantum di dalam undang – undang, seperti Menurut H.J. Van Schravendijk menggambarkan delik mengacu pada suatu aturan yang dapat dikenakan sanksi hukuman, sedangkan Van Hammel mengartikan delik sebagai sebuah tindakan atau pun ancaman yang merusak hak pada individu lain. [[31]](#footnote-31)

Menurut Achmad Ali memberikan pengertian Delik, dalam pengertian yang lebih luas yakni segala tindakan yang melanggar hukum atau regulasi yang telah ditetapkan tanpa membedakan apakah pelanggaran tersebut terjadi dalam ranah hukum privat atau publik, termasuk di dalamnya hukum pidana.[[32]](#footnote-32)

Andi Zainal Abidin berpendapat bahwasanya istilah “delik” (dari bahasa Latin “delictum delicta”) levih tepat digunakan dikarenakan beberapa alasan berikut:[[33]](#footnote-33)

1. Istilah ini memiliki sifat internasional, sehingga dipahami oleh masyarakat di berbagai belahan dunia.
2. Lebih efisien karena merupakan kata yang lebih ringkas.
3. Tidak menimbulkan ambiguitas, berbeda dengan istilah seperti “peristiwa pidana” atau “perbuatan pidana,” yang terkesan fokus pada kejadian atau tindakan, padahal yang sebenarnya dikenakan hukuman yaitu pelakunya.
4. Maknanya yang sangat luas memungkinkan istilah ini untuk mencakup jenis-jenis delik yang berkaitan dengan korporasi atau ranah hukum pidana ekonomi yang melibatkan individu-individu yang tidak dikenal secara langsung.

Andi Hamzah dalam karyanya “Asas-Asas Hukum Pidana” mendeskripsikan delik sebagai sebuah tindakan atau perilaku yang dilarang oleh hukum serta dikenai sanksi pidana sesuai ketetapan yang ada.[[34]](#footnote-34)

**A.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Sebagaimana penjelasan terkait definisi tindak pidana yang didefinisikan oleh para ahli di atas, sebenarnya telah tersirat dengan jelas adanya berbagai unsur tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pelaku. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, berbagai unsur tindak pidana yang dimaksudkan oleh para ahli yakni sebagai berikut.

S.R. Sianturi menerangkan bahwasanya berbagai unsur tindak pidana meliputi :[[35]](#footnote-35)

1. Individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban
2. Perbuatan tersebut mencakup unsur kesalahan yang jelas
3. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum yang ada
4. Tindakan yang diatur dalam peraturan hukum, dengan ancaman hukuman bagi pelanggar
5. Perbuatan terjadi dalam kondisi waktu, tempat, dan situasi tertent.

Sedangkan menurut Moeljatno yang berpendapat bahwasanya unsur perbuatan pidana antara lain :[[36]](#footnote-36)

1. Tindakan yang dilakukan oleh individu
2. Sejalan dengan kebijakan yang telah di tetapkan (persyaratan formal)
3. Menunjukkan sifat yang melawan kebijakan yang ada (persyaratan materiil)

Kewajiban adanya syarat formil dalam hukum pidana sebagai suatu keharusan, mengingat bahwasanya prinsip legalitas yang dijelaskan dalam Pasal 1 KUHP menegaskan hal tersebut. Begitu pula dengan syarat materiil, yang juga mempunyai peranannya yang penting, sebab setiap tindakan harus dipersepsikan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak pantas ataupun tidak boleh dilakukan, dikarenakan melanggar berbagai nilai sosial yang ada di masyarakat.[[37]](#footnote-37)

Menurut Sudarto, merujuk pada pandangan Moeljatno mengenai unsur-unsur tindak pidana, beliau berpendapat bahwasanya tidak cukup hanya dengan melakukan tindakan yang tergolong pidana. Selain itu, individu tersebut juga harus memiliki unsur kesalahan serta kapasitas untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian, Sudarto menekankan bahwasanya unsur-unsur yang menyusun tindak pidana mencakup yakni sebagai syarat pemidanaan antara lain :[[38]](#footnote-38)

1. Perbuatannya, harus memenuhi syarat :
2. Tindakan harus sesuai kebijakan yang ada maupun melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenar
4. Orangnya (kesalahannya), harus memenuhi syarat :
5. Dapat mempertanggungjawabkan perbuatan.
6. Ada unsur kesengajaan atau kelalaian, tanpa alasan pembenar

R.Tresna berpendapat bahwasanya berbagai unsur tindak pidana terdiri atas:[[39]](#footnote-39)

1. Suatu tindakan ataupun berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu
2. Bertolak belakang dengan norma ataupun ketentuan hukum yang berlaku
3. Diikuti dengan pemberian sanksi atau hukuman yang ditetapkan

Berdasarkan penjelasan Jonkers, yang menganut paham monisme, berbagai unsur tindak pidana di antaranya meliputi:[[40]](#footnote-40)

1. Tindakan yang dilakukan,
2. Pelanggaran terhadap hukum yang berlaku,
3. Kesalahan individu yang dapat dipertanggungjawabkan,
4. Perbuatannya.

Sementara itu, menurut Schravendijk, dalam uraian yang lebih rinci, unsur-unsur tindak pidana meliput:[[41]](#footnote-41)

1. Perilaku individu,
2. Tidak sejalan dengan kesadaran hukum,
3. Dikenakan ancaman hukuman,
4. Dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban,
5. Mengandung unsur kesalahankesalahan

Dalam perundang-undangan, terutama yang tercantum pada Buku II KUHP, perumusan tindak pidana mengidentifikasi perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan, sedangkan Buku III mengatur mengenai pelanggaran. Secara konsisten, setiap rumusan tindak pidana mencakup unsur tindakan atau perilaku, meskipun terdapat pengecualian, seperti yang tertera dalam Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan serta pelanggaran hukum kadang tercantum, namun seringkali tidak dijelaskan secara eksplisit. Sementara itu, elemen mengenai kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sama sekali tidak termuat dalam rumusan tersebut.

Merujuk pada rumusan tindak pidana yang tercantum pada KUHP, terdapat delapan unsur utama yang membentuk suatu tindak pidana, di antaranya meliputi:[[42]](#footnote-42)

1. Perilaku.
2. Pelanggaran terhadap hukum.
3. Kesalahan yang dilakukan.
4. Akibat yang menjadi syarat konstitutif.
5. Kondisi yang menyertai tindakan tersebut.
6. Persyaratan tambahan yang memungkinkan adanya tuntutan pidana.
7. Persyaratan tambahan yang dapat memberatkan hukuman.
8. Persyaratan tambahan yang memungkinkan seseorang dipidana.

**A.3 Jenis – Jenis Tindak Pidana**

Berdasarkan formulasi tindak pidana yang ada dalam KUHP, dapat diidentifikasi bahwasanya terdapat delapan unsur yang membentuk tindak pidana, yakni:[[43]](#footnote-43)

1. Dalam KUHP, terdapat pembedaan antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II, maupun pelanggaran yang juga terdapat pada Buku II
2. Dalam hal penyusunannya, terdapat perbedaan antara tindak pidana formil maupun tindak pidana materiil
3. adapun dari jenis kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori: yang dilakukan dengan niat atau kesengajaan (doleus delicten), dan yang terjadi tanpa kesengajaan (culpose delicten)
4. Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua tipe utama, yaitu delik komisi yang terjadi akibat tindakan aktif pelaku (delicta commissionis) serta delik omisi yang muncul karena sikap pasif atau pembiaran terhadap kewajiban yang semestinya dilakukan (delicta omissionis)
5. Berdasarkan durasi terjadinya, tindak pidana mmaput dibedakan atas dua jenis: yang terjadi dalam sekejap dan yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang atau terus-menerus.
6. Berdasarkan sumber asalnya, tindak pidana dibedakan jadi dua kategori yaitu tindak pidana umum serta yang lebih spesifik, yaitu tindak pidana khusus.
7. Dalam hal subjek yang terlibat, terdapat distingsi antara delik communia yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang status tertentu, dan delik propia yang pelaksanaannya secara eksklusif hanya mungkin dilakukan oleh individu dengan status atau kapasitas spesifik dengan ciri khas atau kualitas tertentu.
8. Menurut apakah pengaduan diperlukan dalam proses hukum, tindak pidana dibagi jadi dua, di antaranya tindak pidana biasa maupun aduan.
9. Berdasarkan tingkat keparahan hukuman yang dihadapi, tindak pidana terbagi jadi beberapa kategori, di antaranya tindak pidana dasar (eenvoudige delicten), yang lebih berat (gekwalificeerde delicten), dan yang lebih ringan (geprivilegieerde delicten).
10. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan jenis kepentingan hukum yang ingin dilindungi, seperti perlindungan terhadap nyawa, harta benda, pemalsuan, nama baik, atau kesusilaan.
11. Dilihat dari seberapa sering perbuatan tersebut harus terjadi untuk dianggap sebagai pelanggaran, ada perbedaan antara tindak pidana yang terjadi hanya sekali (enkelvoudige delicten) dan yang terjadi berulang atau berangkai (samengestelde delicten))
12. **Tinjauan Tentang Pemidanaan**

**B.1 Pengertian Pemidanaan**

Andi Hamzah menyatakan bahwasanya pemidanaan atau hukuman adalah konsep yang lebih luas, yaitu suatu bentuk sanksi yang sengaja diterapkan untuk menyebabkan penderitaan pada individu. Sementara itu, pidana merujuk pada istilah yang lebih sempit, yang secara langsung berhubungan dengan hukum pidana. Dengan demikian, menurut Andi Hamzah, terdapat perbedaan mendasar antara pemidanaan, yang fokus pada aspek sanksi yang menyakitkan, dan pidana, yang lebih mengacu pada ketentuan hukum pidana itu sendiri.[[44]](#footnote-44)

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwasanya jika pemidanaan dipahami dalam pengertian yang lebih luas sebagai suatu proses pemberian atau pengenaan hukuman oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan hukum pidana secara konkret. Konsekuensinya, ketentuan tersebut pada akhirnya berujung pada pemberian sanksi pidana terhadap individu yang dinyatakan bersalah. Dengan demikian, keseluruhan regulasi yang mencakup hukum pidana materiil, hukum acara pidana, serta hukum pelaksanaan pidana bisa dipandang sebagai unsur yang terintegrasi membangun sebuah kerangka sistem pemidanaan yang koheren.[[45]](#footnote-45)

Pemidanaan (punishment) merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mendorong terpidana agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dengan harapan mereka bisa berubah jadi individu yang lebih baik serta kembali berkontribusi dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan ketaatan terhadap hukum, penghargaan terhadap norma-norma sosial, moral, dan agama, serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, teratur, dan aman.

Prof. Sudarto menjelaskan bahwasanya pemidanaan sebagai padanan dari istilah penghukuman. Konsep penghukuman itu sendiri bersumber dari kata “hukum,” yang berarti proses penetapan atau keputusan mengenai hukuman yang dijatuhkan.[[46]](#footnote-46)

Lamintang mengemukakan bahwasanya terdapat 3 tujuan utama melalui pemidanaan, yaitu: pertama, untuk memperbaiki karakter individu yang melakukan kejahatan; kedua, untuk memberikan efek jera dengan tujuan orang lain tidak bertindak kejahatan; dan ketiga, untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan tertentu tidak mampu lagi melakukan tindak kejahatan lainnya, terutama pada mereka yang sudah dianggap tidak dapat diperbaiki dengan cara-cara biasa.[[47]](#footnote-47)

Sahetapy berpendapat bahwasanya tujuan utama pemidanaan seharusnya sebagai pembebasan. Dalam penjelasannya, ia menekankan jika pembebasan tidak hanya mengharuskan pelaku untuk dibebaskan dari pemikiran jahat dan keliru, tetapi juga harus membebaskan mereka dari realitas sosial yang membatasi dan menjeratnya.[[48]](#footnote-48)

Menurut UU No. 1/2023 pada pasal 51 terdapat penjelasan terkait tujuan dari pemidanaan yang menerangkan bahwasanya :[[49]](#footnote-49)

1. Menghindari adanya tindak pidana dengan menegakkan aturan hukum yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan maupun pengayoman kepada masyarakat.
2. Mengarahkan terpidana agar dapat diterima kembali dalam masyarakat melalui proses pembinaan dan pendampingan, sehingga individu tersebut menjadi lebih baik maupun memberikan kontribusi dengan positif.
3. Menangani dampak negatif yang muncul akibat tindak pidana dengan memulihkan kestabilan sosial serta mengembalikan rasa aman maupun damai di masyarakat.
4. Menumbuhkan kesadaran akan penyesalan dalam diri terpidana, sekaligus menghapuskan perasaan bersalah yang dirasakannya.

**B.2 Pedoman Pemidanaan**

Sebagaimana UU No. 1/2023 pada pasal 53 ayat (1) dan (2) menjelaskan terkait pedoman pemidanaan. Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwasanya dalam proses peradilan pidana, hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan serta hukum. Sementara itu, pada pasal 53 ayat (2) ditegaskan pabila terdapat konflik antara keadilan serta kepastian hukum dalam penegakan hukum, hakim diwajibkan untuk lebih mengedepankan keadilan.

Dalam rangkaian penyelesaian perkara pidana di pengadilan, seorang hakim diharuskan untuk mempertimbangkan berbagai elemen yang relevan dalam menentukan putusan terhadap terdakwa. Apabila hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap suatu perkara keliru dalam memberikan hukuman kepada terdakwa maka dapat berakibat hakim tersebut bisa dikenakan sanksi baik secara administrasi maupun secara pidana.[[50]](#footnote-50) Selain itu dampak hukum manakala hakim salah mengambil suatu dasar hukum penting dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa dalam putusannya, maka seorang hakim dapat dikenakan hukuman. Majelis hakim wajib mempertimbangkan unsur – unsur dalam pemidanaan telah tertera di pasal 54 ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya :

1. Bentuk kesalahan individu yang melakukan tindak pidana
2. Alasan dan tujuan yang melatarbelakangi tindakan pidana tersebut
3. Faktor mental dan emosional yang mempengaruhi perilaku pelaku
4. Apakah tindak pidana itu secara sengaja atau tidak terencana
5. Metode atau cara yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
6. Tindak lanjut atau reaksi pelaku setelah melakukan perbuatan pidana
7. Latar belakang kehidupan, kondisi ekonomi serta sosial pelaku
8. Dampak hukuman atas perjalanan hidup pelaku di masa depan
9. Dampak tindak pidana kepada korban ataupun keluarganya
10. Kemungkinan adanya pengampunan dari korban dan/atau keluarga korban
11. Nilai hukum serta keadilan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat.

**B.3 Teori Dalam Pemidanaan**

Dalam rangka menyelesaikan kasus pidana di pengadilan, seorang hakim dituntut untuk secara seksama mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan sebelum memutuskan vonis terhadap terdakwa. Hal ini juga tidak luput dari teori – teori dalam pemidanaan. Teori pemidanaan sendiri merupakan salah satu hal yang penting sebab didalam teori tersebut menjabarkan secara jelas tentang dasar pembenar dari pemidanaan. Berikut beberapa Teori – teori pemidanaan yang biasa kita kenal yaitu sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings* Theorien)

Menurut Muladi dan Arief menjelaskan tentang teori pembalasan sebagai berikut :[[51]](#footnote-51)

Pandangan dalam teori-teori “absolut” menegaskan bahwasanya setiap tindak kejahatan harus mendapatkan hukuman, tanpa ada ruang untuk kompromi. Pidana dikenakan hanya karena adanya perbuatan kriminal, tanpa memperhitungkan efek yang mungkin timbul akibat pemberian hukuman tersebut. Fokusnya yaitu pada tindakan yang sudah terjadi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang bisa saja terjadi dimasa depan. Oleh karenanya, pidana dianggap sebagai suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindari, yang berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan, dan justifikasi utama bagi hukuman tersebut adalah kehadiran kejahatan itu sendiri.

Menurut Andenaes, dalam pandangan teori absolut, tujuan utama dari pidana guna memenuhi tuntutan keadilan, sementara berbagai efek positif yang timbul sebagai akibat dari hukuman ialah hasil sampingan atau sekunder.[[52]](#footnote-52)

Tuntutan keadilan yang bersifat mutlak ini tercermin dalam pandangan Imanuel Kant yang terdapat dalam karyanya Philosophy of Law, di mana ia menyatakan bahwa penerapan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk meraih kebaikan atau tujuan lain, baik untuk masyarakat ataupun pelaku. Sebaliknya, hukuman dijatuhkan semata-mata karena individu tersebut sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Setiap orang seharusnya menerima hukuman yang sebanding dengan perbuatannya, dan rasa dendam masyarakat tidak boleh menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Dengan demikian, teori ini dikenal dengan sebutan teori pembalasan.

Menurut Andi Hamzah, pada teori pembalasan atau teori absolut, pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis seperti perbaikan perilaku pelaku kejahatan. Sebaliknya, kejahatan itu sendiri sudah mengandung dasar yang sah untuk penjatuhan hukuman, yang harus diberikan secara mutlak sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu mempertimbangkan keuntungan atau manfaat yang mungkin timbul dari penerapan pidana tersebut.

J.E. Sahetaphy berpendapat bahwasanya jika hukuman dijatuhkan semata-mata untuk tujuan pembalasan atau menakut-nakuti, maka keberhasilan dari tujuan tersebut tidaklah pasti. Sebab, tidak selalu timbul rasa bersalah atau penyesalan dalam diri terdakwa; bahkan mungkin yang muncul adalah rasa dendam. Menurut pandangannya, penerapan hukuman yang kejam sebagai bentuk balasan atau ancaman justru dapat merusak rasa keadilan itu sendiri.[[53]](#footnote-53)

Stahl berpendapat bahwasanya hukum merujuk pada seperangkat norma yang berasal dari kehendak Tuhan, yang diteruskan melalui negara sebagai wakil atau utusan Tuhan di dunia ini. Sebagai manifestasi dari otoritas ilahi, negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan serta menjalankan hukum tersebut,dengan menetapkan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum harus mendapatkan pembalasan yang setimpal melalui pemberian pidana kepada pelanggarnya.[[54]](#footnote-54)

Hegel mengemukakan bahwasanya hukum atau keadilan adalah sebuah kenyataan yang mendasar (sebagai tesis). Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan atau menyerang prinsip keadilan, pada dasarnya menolak eksistensi hukum itu sendiri (anti-tesis). Oleh karena itu, tindakan tersebut harus diimbangi dengan sebuah pidana yang menggambarkan ketidakadilan terhadap pelaku (sintesis), yang pada gilirannya berfungsi untuk memulihkan atau menegakkan kembali keadilan dan hukum (tesis).[[55]](#footnote-55) Selain itu Menurut Hegel berpendapat lain bahwasanya, pidana sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari dan secara logis harus ada sebagai reaksi terhadap perbuatan kejahatan.[[56]](#footnote-56) Adapun karakteristik atau ciri pokoknya dari teori Absolut atau pembalasan, di antaranya yaitu :[[57]](#footnote-57)

* + - 1. Pidana ditujukan semata-mata sebagai bentuk balasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan;
      2. Pembalasan menjadi tujuan utama, yang tidak mencakup upaya lain seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat;
      3. Kesalahan pelaku dianggap sebagai satu-satunya kriteria yang sah untuk menjatuhkan hukuman;
      4. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan derajat kesalahan yang diperbuat oleh pelaku;
      5. Pidana bertujuan untuk menilai masa lalu, berfungsi sebagai penghukuman murni tanpa niatan untuk memperbaiki, mendidik, atau mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat

Menurut Herbart bahwasanya : Jika kejahatan tidak mendapatkan balasan yang setimpal, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Untuk mengembalikan atau memenuhi kepuasan tersebut, dari perspektif estetika, maka kejahatan tersebut harus dibayar dengan hukuman yang sesuai dan proporsional terhadap pelakunya.[[58]](#footnote-58)

Vos menegaskan bahwasanya teori absolut atau pembalasan ini dibagi jadi 2 jenis. Pembalasan subjektif berfokus pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, sementara pembalasan objektif berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku di dunia nyata. Keduanya tidak perlu dianggap bertentangan satu sama lain. Vos memberikan contoh pembalasan objektif, dimana 2 pelaku yang terlibat dalam tindakan yang sama, namun satu menciptakan dampak yang lebih besar, sehingga akan dijatuhi hukuman yang lebih berat.[[59]](#footnote-59)

Karl O. Christiansen mengemukakan bahwa teori pembalasan memiliki lima ciri khas utama, yang antara lain mencakup:[[60]](#footnote-60)

* + - * 1. Pidana berfungsi semata-mata sebagai bentuk pembalasan;
        2. Pembalasan menjadi tujuan yang utama, tanpa mencakup tujuan lainnya, seperti kesejahteraan atau perbaikan masyarakat;
        3. Kesalahan menjadi faktor utama yang berperan dalam penentuan adanya sanksi pidana;
        4. Sanksi pidana perlu diselaraskan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar agar mencerminkan proporsionalitas dalam penegakan hukum;
        5. Pidana berfokus pada tindakan yang telah dilakukan, berfungsi sebagai penghukuman murni, tanpa bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau mengembalikan pelanggar ke dalam masyarakat.

Menurut pandangan penganut teori absolut atau pembalasan, fokus utama dari penjatuhan pidana bukanlah pada manfaat atau tujuan praktis, melainkan pada balas dendam semata. Dalam konteks ini, teori pembalasan yang menegaskan bahwa pidana dijatuhkan hanya sebagai akibat dari pidana itu sendiri, akan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi landasan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, teori ini tidak mempertimbangkan upaya untuk membina atau merehabilitasi pelaku kejahatan dalam proses pemidanaan.

1. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien)*

Hamzah dan Rahayu dalam pandangannya terkait aliran Relatif atau Teori Tujuan, tidak ada keharusan mutlak bahwasanya setiap tindakan kejahatan harus diikuti dengan hukuman. Hal ini mengindikasikan pentingnya mempertimbangkan manfaat yang dapat diperoleh dari pemberian pidana, baik untuk individu yang bersangkutan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif ini, tujuan penjatuhan pidana tidak hanya merujuk dari penghakiman terhadap masa lalu, melainkan berorientasi pada masa depan. Penjatuhan pidana perlu berupaya untuk mencegah terulangnya kejahatan yang serupa di masa depan, dengan mengutamakan pencegahan sebagai tujuan utama.[[61]](#footnote-61)

Menurut pandangan teori ini, suatu perbuatan kriminal tidak serta merta harus direspons dengan hukuman. Sebaliknya, penjatuhan hukuman harus dilihat dari perspektif yang lebih jauh, mempertimbangkan tujuan yang lebih besar dari sekadar memberikan hukuman. Adapun tujuannya terbagi atas dua bentuk:

1). Pencegahan umum (prevensi general) berorientasi pada pencegahan kejahatan secara luas, dengan cara pemidanaan yang dirancang untuk menimbulkan rasa takut pada masyarakat umum, agar mereka tidak berani melakukan tindakan kriminal.

2). Pencegahan khusus (prevensi spesial) lebih terfokus pada individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana, dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi perbuatan serupa. Hal ini bisa melibatkan pemberian sanksi atau upaya pembinaan khusus yang berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku tersebut.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan menekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan tindak pidana. Pemberian pidana dirancang untuk mentransformasi perilaku para pelaku kejahatan serta individu lain yang berpotensi atau cenderung terlibat dalam tindakan kriminal. Tujuan utama dari pemidanaan adalah terciptanya ketertiban sosial, yang mana untuk mewujudkan hal tersebut, penerapan pidana menjadi suatu kebutuhan untuk menegakkan aturan dalam masyarakat.[[62]](#footnote-62)

Koeswadji menyatakan bahwa tujuan utama dari pemidanaan menurut teori Relatif atau Teori Tujuan meliputi beberapa hal, yakni:[[63]](#footnote-63)

a. Menjaga dan mempertahankan keteraturan dalam masyarakat.

b. Memulihkan kerugian yang dialami masyarakat akibat tindak kejahatan.

c. Melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan.

d. Menghilangkan bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan dan

e. Mencegah terjadinya kejahatan di masa depan

1. Teori Gabungan

Hamzah dan Rahayu memberikan pemaparan mengenai Teori Gabungan yaitu:[[64]](#footnote-64)

Teori gabungan ini mengakui bahwasanya pidana mempunyai dua tujuan utama, yaitu pencegahan maupun perbaikan. Namun tetap melihat pembalasan sebagai dasar dari pidana, teori ini menegaskan bahwasanya hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi pembalasan yang wajar. Selain itu, pidana juga dilihat sebagai cara untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dalam masyarakat dan mencegah kejahatan di masa depan. Beberapa tokoh seperti Binding, Markel, Kohler, maupun Beling menggabungkan pembalasan, pencegahan, serta perbaikan sebagai tujuan utama dari pemidanaan.

1. **Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**C.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sebagaimana UU No. 23/ 2004 terdapat definisi dari KDRT yang tertuang di pasal 1 ayat (1) yang menerangkan bahwasanya KDRT merujuk pada segala bentuk tindakan yang ditujukan kepada individu, yakni khususnya pada perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kerugian baik secara psikologis, fisik atau seksual, maupun melalui penelantaran pada konteks rumah tangga. Hal ini juga mencakup ancaman akan kekerasan, pemaksaan, ataupun perampasan kebebasan yang dilakukan secara ilegal dalam ruang lingkup keluarga.

Di dalam UU itu juga menjelaskan terkait Penghapusan kDRT yang tertuang di pasal 1 ayat (2) yang menerangkan bahwasanya penghapusan tersebut sebagai bentuk perlindungan yang disediakan negara guna mencegah adanya tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan, serta memastikan adanya perlindungan bagi korban yang terdampak kekerasan tersebut.

KDRT merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan secara tidak sah dan tanpa batas, yang dilakukan oleh pelaku baik suami, istri, ataupun anggota lain dalam rumah tangga. Tindakan ini mampu menimbulkan ancaman terhadap keselamatan maupun berbagai pribadi setiap individu dalam rumah tangga, termasuk anak, ipar, mertua, atau pembantu.[[65]](#footnote-65)

Adapun penjelasan dari WHO bahwasanya KDRT merujuk pada suatu pola tindakan dalam hubungan yang bertujuan guna mengendalikan atau memperoleh kekuasaan atas pasangan. Bentuk kekerasan yang dimaksud mencakup kekerasan seksual, fisik, emosional, ekonomi, maupun ancaman yang ditujukan kepada pasangan.[[66]](#footnote-66)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwasanya KDRT merujuk pada kekerasan yang didorong oleh ketidaksetaraan gender, yang dapat berpotensi ataupun menyebabkan menyebabkan penderitaan dalam bentuk psikologis, fisik ataupun seksual terhadap perempuan. Tindakan ini mencakup pemaksaan, ancaman pencabutan kebebasan secara ilegal, baik di dalam rumah tangga maupun di luar lingkup rumah.[[67]](#footnote-67)

Evan Stark, seorang ahli dalam kajian KDRT, mengemukakan konsep “kontrol koersif”. Menurutnya, kekerasan ini tidak sekadar terbatas pada tindakan fisik, melainkan mencakup rangkaian strategi yang terstruktur yang digunakan oleh pelaku untuk menguasai maupun mendominasi korbandengan ancaman, tekanan, serta manipulasi mental.[[68]](#footnote-68)

Lundy Bancroft, seorang terapis sekaligus penulis yang berfokus pada penanganan pelaku KDRT, menggambarkan KDRT sebagai suatu pola perilaku yang dimanfaatkan individu untuk mengukuhkan dominasi dan kontrol atas pasangan mereka. Bancroft menyoroti bahwasanya KDRT mencakup manipulasi emosional, pemaksaan seksual, serta penindasan ekonomi, yang kesemuanya menjadi bagian dari upaya memperkuat kekuasaan, selain kekerasan fisik.[[69]](#footnote-69)

Murray A. Straus, seorang ahli sosiologi yang berpengaruh, menciptakan Conflict Tactics Scale (CTS) sebagai instrumen untuk mengukur KDRT. Menurut Straus, KDRT meliputi beragam tindakan, baik fisik, verbal, maupun emosional, yang dipergunakan sebagai penyelesaian ketegangan atau perselisihan dalam hubungan pasangan.[[70]](#footnote-70)

**C.2 Asas dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Upaya pemberantasan KDRT berdasarkan prinsip-prinsip Pada Pasal 3 UU No.23 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Pengakuan terhadap martabat dan hak fundamental setiap individu,
2. Prinsip keadilan dan kesetaraan gender, yang mengacu pada situasi yang mana perempuan maupun laki-laki memperoleh posisi yang setara serta mempunyai peluang yang sejajar guna mewujudkan berbagai hak serta potensi diri mereka, demi mendukung keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga dengan cara yang proporsional,
3. Prinsip nondiskriminasi, dan
4. Perlindungan terhadap individu yang menjadi korban kekerasan

Tujuan dari upaya pemberantasan KDRT di Indonesia Pada Pasal 4 UU No.23 Tahun 2004 mencakup:

1. Menghindari terjadinya segala bentuk KDRT,
2. Menjamin perlindungan bagi korban yang mengalami KDRT,
3. Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku KDRT,
4. Menjaga agar rumah tangga tetap terpelihara dalam keharmonisan dan kesejahteraan

**C.3 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pada UUPKDRT No. 23/2004 terdapat klasifikasi seseorang yang bisa dinyatakan sebagai KDRT. Hal tersebut tercantum di Pasal 2 ayat (1) serta ayat (2), pada Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwasanya Lingkup Rumah Tangga di antaranya:

1. Pasangan istri suami serta anak,
2. Individu yang terhubung secara kekerabatan dengan orang-orang yang disebutkan pada poin a melalui ikatan darah, pengasuhan, susuan, perkawinan, atau perwalian, yang tinggal dalam satu rumah tangga;
3. Pekerja yang memberikan bantuan dalam pengelolaan rumah tangga serta tinggal di rumah tersebut

Sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwasanya individu yang bekerja seperti yang tercantum di poin c dianggap menjadi bagian dari keluarga selama periode mereka tinggal dan berkontribusi dalam rumah tangga tersebut.

1. Diva Lufiana Putri, Rizal Setyo Nugroho, Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2024 Di Tingkat Dunia menurut World Population Review, diakses dari Kompas.Com: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/25/180000765/20-negara-penduduk-terbanyak-di-dunia-2024-indonesia-nomor-berapa-?page=all>. Di akses pada hari Sabtu 21 September. Pada pukul 22.24 WIB. Hal 4. [↑](#footnote-ref-1)
2. Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), Kekerasan Berbasis Gender Menurut *CEDAW* (General Recommendation No.19 (1992) Commite, diakses dari Komnas Perempuan : <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>. Di akses pada hari Sabtu 21 September. Pada pukul 22.24 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat (1) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Yunus, Supianto, “Pemahaman Masyarakat Terhadap UUPKDRT Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Rechtens,* Vol.8, No.2, Desember 2019, <https://ejurnal.uji.ac.id/index.php/REC/article/download/530/489/986>. Di akses pada hari Sabtu 22 September 2024. Pada pukul 09.00 WIB. Hal 146. [↑](#footnote-ref-4)
5. Melsi Syawitri dan Afdal, “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, Jurnal Penelitian Guru Indonesia – JPGI (2020) Vol 5 No 1, <https://www.researchgate.net/publication/344088783_Analisis_Faktor-faktor_yang_Mempengaruhi_Relasi_Kuasa_Pelaku_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga_KDRT>. Di akses pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Pada pukul 23.39 WIB. Hal 38. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pada Pasal 2 ayat (1) [↑](#footnote-ref-6)
7. Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., “Pengertian Delik Aduan”, diakses dari Hukum Online.Com <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-delik-aduan-bisa-dicabut-kembali-lt4edef75d5869e/>. Di akses pada hari Kamis 10 Oktober 2024 . Pada pukul 23. WIB. Hal 1.

   [↑](#footnote-ref-7)
8. Rintan Puspita Sari, “Rangkuman Kasus KDRT Lesti Kejora, Penetapan Tersangka Rizky Billar Berujung Pencabutan Laporan”, diakses melalui <https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/14/102203766/rangkuman-kasus-kdrt-lesti-kejora-penetapan-tersangka-rizky-billar-berujung?page=all>, pada hari Selasa 17 Desember 2024, Pada Pukul 11.15 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. Amir Baihaqi, “Heboh Drama KDRT Ferry Irawan Ke Venna Melinda di Awal Tahun 2023”, diakses melalui <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7077304/heboh-drama-kdrt-ferry-irawan-ke-venna-melinda-di-awal-tahun-2023?single=1>, pada hari Selasa 17 Desember 2024, Pada Pukul 11.15 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
10. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Artikel “ Jenis – Jenis Surat Dakwaan”, Di akses melalui [https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-surat dakwaan/#:~:text=Dakwaan%20Tunggal%20Merupakan%20Surat%20yang%20hanya%20satu,didakwakan%2C%20Karena%20tidak%20terdapat%20kemungkinan%20untuk%20mengajukan](https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-surat%20dakwaan/#:~:text=Dakwaan%20Tunggal%20Merupakan%20Surat%20yang%20hanya%20satu,didakwakan%2C%20Karena%20tidak%20terdapat%20kemungkinan%20untuk%20mengajukan). Di akses pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Pada pukul 23.56 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Reza Aditya, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AL (Studi Putusan : PUT/153-K/PM 1-04/AL/XI/2011)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung,(2016). <http://digilib.unila.ac.id/23575/>. Di akses pada hari Jumat 11 Oktober 2024. Pada pukul 00.6 WIB. Hal 4. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lutfiah Fauzi, Emy Rosnawati, “Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Researchjet Journal of Analysis and Inventions Vol:2, No 4, 2023, Page: 1-10, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo <https://www.researchgate.net/publication/374436223_Analisis_Putusan_Hakim_No_180PidSus2020PN_Sda_terhadap_Korban_Tindak_Pidana_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga>. Di akses pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Pada pukul 00.37 WIB. Hal 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Milya Sari (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Indonesia), Asmendri (Institute Agama Islam Negeri Batusangkar), “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan Ipa”, Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1),2020, (41-53) <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>. Di akses pada hari Rabu 2 Oktober 2024. Pada pukul 13.55 WIB. Hal 43. [↑](#footnote-ref-13)
14. Annisa Fianni Sisma, “5 Macam Pendekatan Penelitian Normative menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum : Edisi Revisi”, diakses melalui <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. Di akses pada hari Rabu 2 Oktober 2024. Pada Pukul 16.37 WIB. Hal 1-2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pengertian Data Sekunder Menurut Soerjo Soekamto, diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/8263/5/BAB%20III.pdf>. Di akses pada hari Kamis 3 Oktober 2024. Pada pukul 11.32 WIB. Hal 34. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H, “Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, Diakses melalui <https://bphn.go.id/data/documents/analisis_atas_mekanisme_penanganan_hkm_thd_tindak_pidana_kesusilaan.pdf>. Di akses pada hari Rabu 11 Desember 2024. Pada pukul 1.44 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, 1983, Terjemahan resmi dari Wetboek Van Strafrecht (WVS) diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Derpartemen Kehakiman, Pertama, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta [↑](#footnote-ref-17)
18. Definisi “Delik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/9216b34fbe82aa2aa3e53e55e59ce452.pdf> [↑](#footnote-ref-18)
19. Drs. Adami Chazawi, S.H., “Buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana , Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”, Hal 75 [↑](#footnote-ref-19)
20. Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, Hal 75 [↑](#footnote-ref-20)
21. H.J.Schravendijk, Op. Cit, Hal 75 [↑](#footnote-ref-21)
22. Simons, Op. Cit, Hal 75 [↑](#footnote-ref-22)
23. Definisi Satochid Kartanegara, Hal 6, diakses dari Website Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura <file:///C:/Users/user/Downloads/1862628c87f2663a966536e9057414c6.pdf> [↑](#footnote-ref-23)
24. Drs. Adami Chazawi, S.H., “Buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana , Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”, Hal 4 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ridwan Harry Simanungkalit, M. Ridwan Lubis, “ Penerapan Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Putusan Nomor 2157/Pid.Sus/2017/PN. Mdn)”, Demokrasi : Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Vol.1, No.4, 4 Oktober 2024, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/532>, Hal 7 [↑](#footnote-ref-25)
26. Irene Ulfa, “ Pembuktian Pengajur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak”, Jurnal Media Luris Universitas Airlangga , Vol.1, No.2, Juni 2018, <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/8833/5053>, Hal 3 [↑](#footnote-ref-26)
27. Nizam Safaraz,”Pengertian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Diakses <https://pdfcoffee.com/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur-pdf-free.html>, Hal 2 [↑](#footnote-ref-27)
28. Menurut Usman Simanjuntak, “Definisi Perbuatan Pidana”, diakses <http://digilib.unila.ac.id/9423/3/BAB%20II.pdf>, Hal 1 [↑](#footnote-ref-28)
29. Muflih R Purnama Suci, “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbantuan Percobaan Penipuan (Studi Putusan No.91/PID.B/2019/PN.BTM)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara,(2021). Diakses <http://eprints.ubhara.ac.id/968/2/revisi%20sidang.pdf>, . Hal 23. [↑](#footnote-ref-29)
30. Jonkers, “Definisi Peristiwa Pidana”, diakses dari

    <https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1545/5/108400010_file5.pdf> [↑](#footnote-ref-30)
31. H.J. Van Schravendiik, “Definisi Delik”,diakses dari

    <file:///C:/Users/user/Downloads/1862628c87f2663a966536e9057414c6%20(1).pdf> [↑](#footnote-ref-31)
32. Achmad Ali, “Definisi Delik” diakses dari

    <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/258/3/BAB%202%20DIANA.pdf> [↑](#footnote-ref-32)
33. Samud,“Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Artikel Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon,Mahkamah Vol.2 No.1, Diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/1662-4358-1-PB.pdf> , . Hal 58. [↑](#footnote-ref-33)
34. Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H,” Buku Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia”, <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf>, Hal 36 [↑](#footnote-ref-34)
35. S.R. Sianturi ,“unsur – unsur tindak pidana”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> [↑](#footnote-ref-35)
36. Moeljatno,“ Unsur – Unsur Perbuatan Pidana”,diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/70de9e6d131d5811daa874a4b7d8a35b.pdf>, Hal 20 - 21 [↑](#footnote-ref-36)
37. Moeljatno, Op. Cit, Hal 21 [↑](#footnote-ref-37)
38. Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H.,M.H,“Buku Hukum Pidana”, diakses dari <https://repo.jayabaya.ac.id/2154/1/BUKU%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL.pdf>, Hal 46 [↑](#footnote-ref-38)
39. Drs. Adami Chazawi, S.H., “Buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana , Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”, Hal 80 [↑](#footnote-ref-39)
40. Jonkers, Op.Cit, Hal 81 [↑](#footnote-ref-40)
41. Schravendijk, Op.Cit, Hal 81 [↑](#footnote-ref-41)
42. Unsur Tindak Pidana, Op.Cit, Hal 82 [↑](#footnote-ref-42)
43. Drs. Adami Chazawi, S.H., “Buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana , Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”, Jenis – Jenis Tindak Pidana, Hal 121 [↑](#footnote-ref-43)
44. “Pengertian Pemidanaan menurut Andi Hamzah”,diakses https://e-journal.uajy.ac.id/18184/3/HK118182.pdf [↑](#footnote-ref-44)
45. Barda Nawawi Arief, Ibid., hal 14 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ridzan Eka Marganda, Pengertian Pemidanaan menurut Prof Sudarto, diakses dari https://repository.upstegal.ac.id/5223/3/BAB%20II%20-%20Ridzan%20eka%20marga.pdf [↑](#footnote-ref-46)
47. P.A.F. Lamintang, Pengertian Pemidanaan menurut Lamintang, diakses dari buku hal 23 [↑](#footnote-ref-47)
48. Sahatepy, Pengertian Pemidanaan, diakses melalui <https://digilib.unila.ac.id/10190/3/BAB%20I.pdf> [↑](#footnote-ref-48)
49. Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 pada pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan [↑](#footnote-ref-49)
50. Akibat dari hakim memberikan hukuman terhadap terdakwa salah <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-bisa-dipidana-bila-salah-memutus-lt4f8c19e7d75c6/> [↑](#footnote-ref-50)
51. Guse Prayudi, SH, Buku Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal 130 [↑](#footnote-ref-51)
52. Ibid, hal 130 [↑](#footnote-ref-52)
53. Fitriani, PENJATUHAN PIDANA MATI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA, Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2, No. 8 Agustus 2023 , Hal 3 [↑](#footnote-ref-53)
54. Wahdania, Tinjauan Yuridis Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassarr, Hal 14 [↑](#footnote-ref-54)
55. Ririn Nurfaathirany Heri, Heri Tahir, St.Junaeda, Kurnia Ali Syarif, Universitas Negeri Makassar, Perampasan Kemerdekaan Dan Pembatasan Kebebasan Dalam Hukum, Diakses dari Seminar Nasional Hasil Penelitian 2023 Hal 4 [↑](#footnote-ref-55)
56. Ayu Efritadewi, S.H., M.H, Modul Hukum Pidana, Teori Absolut Menurut Hegel, Hal 8 [↑](#footnote-ref-56)
57. Ibid, hal 8 [↑](#footnote-ref-57)
58. Muhammad Aenur Rosyid, S.HI., M.H, Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Syari’ah, Universitas Agama Islam Negeri Jember, Hal 28 [↑](#footnote-ref-58)
59. Teori Pemidanaan menurut Vos <file:///C:/Users/user/Downloads/f313ef7bb628fb383a40ce98a2df3803%20(1).pdf> [↑](#footnote-ref-59)
60. Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna ayasari Muin, A.M Djaelani Prasety, Ali Rizky, Universitas Hassanudin Indonesia, Universitas Hassanudin Indonesia , Universitas Hassanudin Indonesia, Universitas Hassanudin Indonesia, Universitas Halu Oleo Indonesia, Artikel Volume 6 Issue 2, September 2022, Perkembangan Teori – Teori Tujuan Pemidanaan Development of Theories of the Purpose of Punishment, Hal 5 [↑](#footnote-ref-60)
61. Guse Prayudi, SH, Buku Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal 131 [↑](#footnote-ref-61)
62. Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, Fauziah Lubis, Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia : Kajian Literatur atas KUHP Baru, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Jurnal Hukum Volume 05, Number 01, 2024, diakses melalui <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/507/353/> [↑](#footnote-ref-62)
63. Meldy Ance Almendo, PRINSIP KEADILAN DALAM TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KARENA PELAKU TIDAK MENJALANI PEMIDANAAN, Universitas Airlangga, Arickle history: Subbmiteed 12 November 2016, Di akses melalui <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/1956/3630> [↑](#footnote-ref-63)
64. Ibid, hal 131 [↑](#footnote-ref-64)
65. Muhammad Arexxa Budi Tresna, Fakultas Hukum Universitas Singa Purbangsa Karawang, Analisis Kasus Marahi Suami Pulang Mabuk Seorang Istri Di Penjara Yang Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum, Di akses melalui : <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/8761/5424/> [↑](#footnote-ref-65)
66. Pengertian KDRT Menurut WHO, di akses dari :<https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse>, [↑](#footnote-ref-66)
67. Bpmid, Pengertian KDRT Menurut Para Ahli : Menyelami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Diakses melalui <https://bpmid.uma.ac.id/pengertian-kdrt-menurut-para-ahli-menyelami-kekerasan-dalam-rumah-tangga/> [↑](#footnote-ref-67)
68. Ibid [↑](#footnote-ref-68)
69. Ibid Pengertian KDRT menurut Lundy Bancroft [↑](#footnote-ref-69)
70. [Ibid](https://bpmid.uma.ac.id/pengertian-kdrt-menurut-para-ahli-menyelami-kekerasan-dalam-rumah-tangga/) [↑](#footnote-ref-70)